

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dasar dari masalah yang terjadi pada masyarakat ada karena hubungan timbal balik karena proses interaksi sosial. Interaksi sosial terbagi menjadi dua, yaitu interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial asosiatif dapat menimbulkan gejala sosial yang normal, hasilnya akan menjadi keteraturan dalam hidup bermasyarakat. Sedangkan interaksi sosial disosiatif dapat memberikan gejala sosial yang tidak normal (*patologis*) yang menimbulkan ketidakteraturan (*disintegrasi*).

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan digunakan untuk dokumen perencanaan strategis di susun sesuai dengan proyeksi kebutuhan masyarakat dan kelembagaan dengan pengacu pada Pola Dasar dan Program Pembangunan Daerah serta menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan 2016-2021.

Proses sosialisasi adalah proses belajar berinteraksi bagi individu di tengah-tengah masyarakat. Proses tersebut adalah proses pengenalan lingkungan sosial dan lingkungan alam, dari lingkungan keluarga, teman sepermainan, lingkungan sekolah, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat luas.

Dalam ilmu sosiologi, gejala sosial disebut dengan masalah sosial. Masalah tersebut terjadi karena ada unsur dalam kelompok masyarakat yang tidak berfungsi normal, yang mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Masalah sosial yang dimaksud berarti sesuatu yang terjadi dalam kehidupan nyata (*das sein*) tidak berjalan sesuai dengan harapan (*das soillen*) di dalam kehidupan sosial.

Suatu masalah dikatakan sebagai masalah sosial apabila dapat dirasakan efeknya oleh banyak orang. Dalam hal ini, tidak ada batasan pasti mengenai jumlah orang yang harus dipenuhi, Apabila efek masalah itu dirasakan oleh dua orang atau lebih, maka hal itu juga bisa dikatakan masalah sosial.

Dengan berkembangnya tuntutan pelayanan administrasi yang diberikan penyelenggara pemerintahan lebih maksimal, maka peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa harus mempunyai sistem orientasi yang dapat memberikan kepuasan kepada pengguna jasa, dengan itu penyelenggaraan pelayanan dikatakan berhasil. Keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima layanan, apabila sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.

Negara dan pemerintah harus ikut serta mengatur masyarakat untuk melayani kepentingan rakyat, agar mengalami perubahan seiring meningkatnya tuntutan rakyat. Pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka melayani masyarakat umum, yang meliputi tugas dan fungsi, mendaftarkan dan menerbitkan KTP (*kartu tanda*

penduduk), Kartu Keluarga, Akta Catatan Sipil, maupun pencatatan Mutasi dan pengelolaan Data Penduduk.

Adanya program E-KTP ini tentunya berfungsi sebagai identitas pribadi, dan dapat digunakan untuk akses kesehatan, sekolah, pemilihan umum, bisnis, perbankan, serta mendukung terwujudnya database kependudukan yang akurat. Dengan diterapkannya e-KTP juga dapat mencegah peluang terjadinya KTP ganda dan palsu. Database E-KTP dapat diakses dari berbagai daerah melalui database nasional. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini diangkat judul tentang : **Analisis Strategi Sosialisasi Dan Promosi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Dalam Mengkampanye Wajib E-KTP Pada Masyarakat Kabupaten Lamongan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimana strategi sosialisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten lamongan dalam mengkampanye wajib E- KTP pada masyarakat ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui strategi sosialisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten lamongan dalam mengkampanye wajib E- KTP pada masyarakat.

D. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan dalam mengkampanye wajib e-KTP, serta diharapkan mampu memberikan sumbangsih yang berarti dalam pelaksanaan strategi sosialisasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan dalam melayani masyarakat.

2. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperdalam pengetahuan dan menambah pemikiran dalam Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terutama dalam studi Ilmu Komunikasi.